



**DESENTRALISASI FISKAL DI SEKTOR KELAUTAN PASCA
BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh :

Fahrur Rozi

2320113008

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

HALAMAN PERSETUJUAN

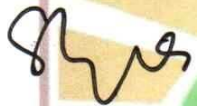
**DESENTRALISASI FISKAL DI SEKTOR KELAUTAN PASCA BERLAKUNYA
UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi
Persyaratan Program Studi
Magister Hukum

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Syofiarti, SH., MHum
NIP 197405181999032001


Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., MH.
NIP 197205162000031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Andalas


Dr. Yasniwati, S.H., MH
NIP 197211132005012001

HALAMAN PENGESAHAN

VALIDITY SHEET

No. Reg:57/MH/I/2026

DESENTRALISASI FISKAL DI SEKTOR KELAUTAN PASCA BERLAKUNYA
UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA

*FISCAL DECENTRALIZATION IN THE MARINE SECTOR AFTER THE ENACTMENT OF
THE JOB CREATION LAW*

Disusun Oleh
Author

Fahrur Rozi, SH

2320113008

UNIVERSITAS ANDALAS

Program Studi: Magister Hukum
Study Program: Master Of Law

**Tesis Ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 13 Februari
2026 Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:**

*This Thesis Been Defended In A Comprehensive Examination Session On February 13h, 2026 and
Declare Passed By The Examining Team Consisting Of:*

Pembimbing I
Supervisor I

Dr. Syofiarti, SH., MHum
NIP 197405181999032001

Pembimbing II
Supervisor II

Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., MH.
NIP 197205162000031002

Penguji I
Examiner I

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum
NIP 197106301998021002

Penguji II
Examiner II

Prof. Dr. Khairani, SH., MH.
NIP 196212111989012001

Penguji III
Examiner III

Dr. Yuslim, S.H., M.H
NIP 195707061983031008

Dekan
Dean

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H
NIP 196807231993021001

Ketua Program Study
Head Of Study Program

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP 197211132005012001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Andalas, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahrur Rozi, S.H
NIM : 2320113008
Program Kajian :
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul :

Desentralisasi Fiskal Di Sektor Kelautan Pasca Berlakunya Undang - Undang Cipta Kerja

Beserta perangkat yang ada (Jika Diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non-Eksklusif ini Universitas Andalas berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya, tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padang
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

Yang Menyatakan

Fahrur Rozi, S.H
NIM. 2320113008

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

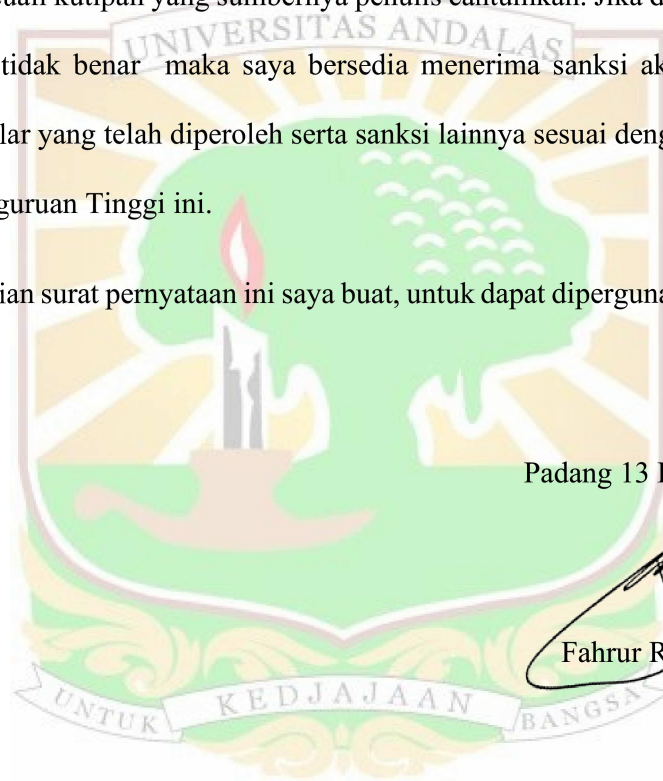
Nama :Fahrur Rozi, SH

NIM :2320113008

Dengan ini menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tuliskan dengan judul

“Desentralisasi Fiskal Di Sektor Kelautan Pasca Berlakunya Undang - Undang Cipta Kerja” adalah hasil karya sendiri, bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya penulis cantumkan. Jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya



Padang 13 Februari 2025

Fahrur Rozi, SH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah S.W.T. atas semua nikmat, berkah dan karunia-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“DESENTRALISASI FISKAL DI SEKTOR KELAUTAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA”**. Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materil selama menyelesaikan penulisan Tesis ini. Teristimewa atas kasih sayang yang telah diberikan oleh keluarga kecil Penulis, Zola Oktavia, S.Pd yang selalu mendampingi penulis dan memberikan semangat, serta anak-anak tercinta Safwana Myza, Shafiyah Aliyah, Ahmad Arqom yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tesis ini, Demikian pula ayahanda Suhatsyah dan ibunda Siti Aisyah (Almh) yang sangat banyak memberikan perhatian dan pengorbanan untuk anak-anaknya. Kepada Saudara-saudara penulis Samsul Mirwan, Rahma Devi, Waldi dan Riki Azzuhri yang mendukung setiap langkah penulis dalam berkarya. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Dr. Syofiarti, SH., MHum, selaku Pembimbing 1, dan Bapak Dr. Dr. Dian Bakti Setiawan, S.H., MH. selaku Pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan, dan pengarahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini Semoga Allah S.W.T. selalu memberi rahmat dan lindungan kepada keduanya. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

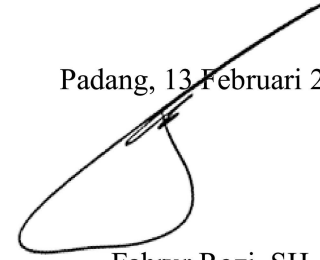
1. Bapak Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas,

2. Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., LL.M. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Bapak Dr. Hengki Andora, SH, LLM selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas,
4. Ibu Dr. Yasniwati, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Anton
5. Bapak Dr. Anton Rosari, S.H., M.H selaku Sekretaris Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M., Hum, Ibu Prof. Dr. Khairani, SH., MH, dan Bapak Dr. Yuslim, S.H., M.H sebagai penguji yang banyak memberikan koreksi dan masukan kepada penulis.
7. Segenap Tim Pengajar/Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Staf Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang banyak membantu proses administrasi penyelenggaraan pendidikan.
9. Rekan-rekan se-angkatan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya Kelompok Belajar Semangka.
10. Kepala BPRL Padang dan Rekan-rekan kerja di BPRL Padang yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian.

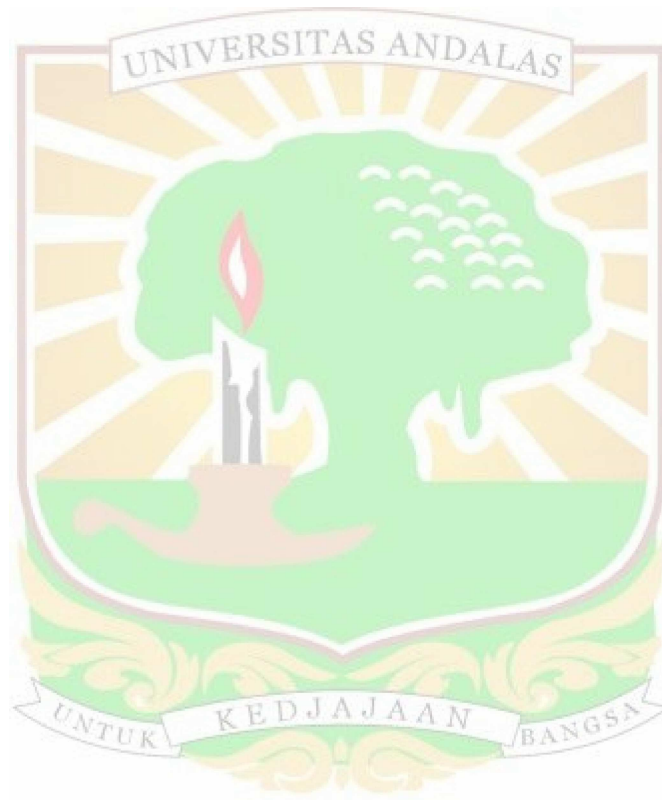
Akhirnya atas segala bantuan, dorongan dan motivasi dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih. Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan pengembangan Ilmu Hukum secara umum dan Ilmu Hukum Administrasi Negara secara khusus. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini serta masih jauh untuk kategori sempurna, mengingat

segala keterbatasan pada kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran positif sangat penulis harapkan.

Padang, 13 Februari 2026



Fahrur Rozi, SH



DESENTRALISASI FISKAL DI SEKTOR KELAUTAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang Cipta Kerja tidak saja mengubah tata cara penyusunan peraturan per Undang-undangan tapi juga tata kelola perizinan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Penyeragaman perizinan berusaha yang sebelumnya terfragmentasi di tingkat daerah yang mengatur sektor kelautan dilakukan penyederhanaan perizinan dan sentralisasi kewenangan. Namun, perubahan ini menimbulkan ke tidak jelasan pengaturan desentralisasi , khususnya dalam hal Pembagian kewenangan pusat-daerah yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki sumber daya kelautan kesulitan melakukan pengelolaan potensi dan mengambil manfaat keuangan dalam bentuk penerimaan akibat kompleksitas prosedur dan pembagian kewenangan baru. Diperlukan solusi untuk menyelaraskan Undang-undang Cipta Kerja dengan prinsip otonomi daerah khusus di sektor kelautan. Berdasarkan kondisi tersebut tulisan ini untuk menjawab bagaimanakah pengaturan desentralisasi di sektor kelautan oleh Undang-undang Cipta Kerja dan bagaimana implikasi hukum desentralisasi di sektor kelautan setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja?. Sifat penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan per-Undang-undang an untuk melihat sejauh mana peraturan yang mengatur desentralisasi di sektor kelautan serasi secara vertikal(perundangan yang berkedudukan berbeda) atau horizontal (perundang-undangan yang sederajat atau sama) dalam pandangan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengaturan Desentralisasi Fiskal Di Sektor Kelautan Oleh Undang -Undang Cipta Kerja cenderung mengurangi otonomi daerah di sektor kelautan. Kemudian pada regulasi turunan Undang-undang Cipta Kerja terjadinya kekosongan hukum perizinan sektor kelautan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kegiatan investasi sekaligus berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini memerlukan penyempurnaan Kerangka Regulasi Desentralisasi dalam Undang-undang Cipta Kerja. Pemberian diskresi administratif kepada daerah dengan pengawasan ketat, serta penyusunan Perda inisiatif untuk mengisi kekosongan hukum.

***FISCAL DECENTRALIZATION IN THE MARINE SECTOR AFTER THE
ENACTMENT OF THE JOB CREATION LAW***

ABSTRACT

Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law has fundamentally transformed licensing governance, which constitutes a vital source of Regional Government Revenue. The standardization of marine sector business licensing, which was previously fragmented at the regional level, has been simplified and centralized. However, these changes create ambiguity in decentralization, particularly regarding central-regional jurisdictional boundaries and their influence on Regional Government Revenue. Due to procedural complexities and new divisions of authority, resource-rich regions encounter difficulties in managing their maritime potential and securing financial benefits. Consequently, the Job Creation Law must be aligned with regional autonomy principles within the marine sector. This study investigates the framework of decentralization fiscal in the marine sector under the Job Creation Law and evaluates its legal implications. Utilizing normative legal research and a statutory approach, the paper examines whether these regulations maintain vertical and horizontal consistency within the Indonesian legal system.

Findings indicate that the Job Creation Law tends to diminish regional autonomy in the marine sector. Furthermore, legal voids in marine licensing within implementing regulations lead to investment uncertainty and decreased Regional Government Revenue. Therefore, the decentralization regulatory framework requires refinement. Administrative discretion should be granted to regional governments under strict supervision, complemented by the development of local initiative regulations to address existing legal gaps.

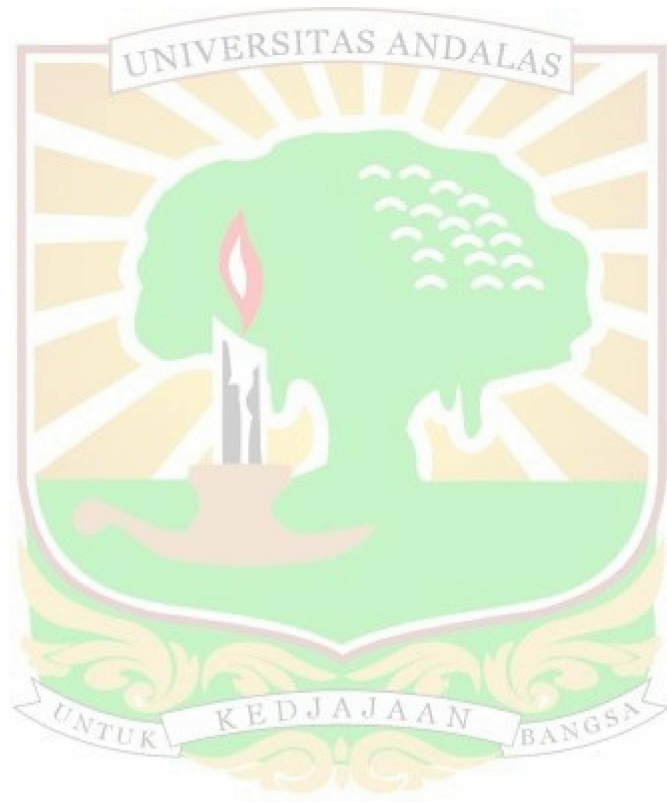
Keywords: Job Creation Law, Decentralization Fiscal, Marine Sector, Regional Autonomy, Regional Government Revenue.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran	15
1. Kerangka Pemikiran	15
2. Kerangka Teori.....	18
F. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan Masalah	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Sumber dan Jenis Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	27

5. Teknik Analisis Data.....	28
6. Orisinalitas Penelitian.....	29
BAB II TEORI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN DESENTRALISASI SEKTOR KELAUTAN	34
A. Teori Hierarki Per- Undang-Undangan.....	34
B. Teori Desentralisasi	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pengaturan Desentralisasi Di Sektor Kelautan pasca penetapan Undang-undang Cipta Kerja.....	48
1. Sentralisasi Kewenangan Perizinan	78
2. Dampak Sentralisasi Kewenangan Perizinan Terhadap Daerah.....	85
B. Permasalahan Hukum Yang Muncul Dalam Implementasi Desentralisasi Di Sektor Kelautan Setelah Diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja.	85
1. Kekosongan Regulasi Turunan.....	99
2. Ketidakselarasan Antara Undang-undang Cipta Kerja, Undang - Undang HKPD dan Regulasi Turunan.....	79
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Rekomendasi	106



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Zona Laut dan Kewenangan Pengelolaan.....	3
Tabel 2. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kelautan	3
Tabel 3. Pembagian Kewenangan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan	49
Tabel 4. Rangkuman Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	52
Tabel 5. Tabel Perbandingan Undang-undang	52
Tabel 6. Rincian Pembagian Urusan Bidang Kelautan (pengelolaan SDA, tata ruang, perizinan, keamanan) pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014	53
Tabel 7. Pembagian Urusan Bidang Pariwisata	54
Tabel 8. Kewenangan Wilayah Laut Indonesia	55
Tabel 9. Pembagian Kewenangan Pemanfaatan dan Pengusahaan Kelautan	56
Tabel 10. Transformasi kewenangan di sektor kelautan berdasarkan peraturan per Undang-undangan periode sebelum dan sesudah di berlakukannya Undang- undang Cipta Kerja.....	60
Tabel 11. KBLI 109 Sektor Kelautan	66
Tabel 12. KBLI 110 Sektor Kelautan	67
Tabel 13. Komparasi Keberhasilan Desentralisasi Di Brasil dan India.....	85
Tabel 14. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Kelautan	86
Tabel 15. Pendapatan Daerah Provinsi Di Indonesia Periode 2022 s.d. 2024.....	96

Tabel 16. Pelimpahan Kewenangan Melalui Desentralisasi Sektor Perizinan Tertentu
Berdasarkan Hierarki Per-Undang-Undangan..... 103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Wilayah Perairan Laut.....	5
Gambar 2. Figur Ruang Laut Indonesia.....	8
Gambar 3. Klaster Ekonomi Maritim Indonesia.....	10
Gambar 4. Daya Saing Indonesia.....	12
Gambar 6. Kerangka Konseptual.....	22
Gambar 7. Stufenbau Theori oleh Hans Kelsen.....	37
Gambar 11. Estimasi Penerimaan Negara dari PKKPRL.....	93
Gambar 12. Rumus Perhitungan Rasio Kapasitas Daerah.....	94
Gambar 13. Perbandingan Rasio Kapasitas Antar Provinsi di Indonesia.....	94
Gambar 14. Distribusi Kapasitas Fisikal Indonesia Berdasarkan Kategori Rasio dalam %.....	95
Gambar 15. Bagan Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Di Indonesia Periode 2022 s.d. 2024.....	96
Gambar 15. Kekosongan Aturan Perizinan Sektor Kelautan.....	100
Gambar 16. Pagar Laut Tangerang Banten.....	92
Gambar 18. Sengketa Kepemilikan Pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.....	96
Gambar 19. Ilustrasi Penyempurnaan Kerangka Regulasi Undang-undang Cipta Kerja.....	97

Gambar 20. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perizinan Sektor
Kelautan.....98

